

**PENGARUH AKUNTABILITAS DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA PEMERINTAHAN DESA DAN  
KELURAHAN DI KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG**

**Aditya Achmad Fathony**  
[aditya\\_fathony@yahoo.co.id](mailto:aditya_fathony@yahoo.co.id)

**Lusia Sitokmabin**  
[saluks351@gmail.com](mailto:saluks351@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan sampel yang diambil sebanyak 8 orang dari masing-masing Pemerintahan Desa dan Kelurahan sehingga jumlah sampel sebanyak 64 responden.

Berdasarkan hasil analisis bahwa secara simultan dan parsial Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 61,7% dan sisanya sebesar 38,3% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur tetapi tidak diteliti.

**Kata kunci :** Akuntabilitas Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 Huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat dengan menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas tentang Dana Desa.

Tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan desa. Dalam sistem pengelolaan, kepala desa menunjuk pada perangkat untuk

mengelola dana yang ada. Dengan adanya alokasi dana desa, semua penyelenggara desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus mampu mengelola dana yang telah memberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yaitu alokasi dana desa. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Alokasi dana desa sebagian peruntukkan untuk pembangunan.

Pembangunan salah satu alat penunjang bagi suatu desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Pengalokasian dana desa, rencana atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Pembangunan desa terdapat berbagai jenis salahsatunya adalah pembangunan insfrastruktur, dengan adanya pembangunan insfrastruktur dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Alokasi dana desa diperuntukan juga bagi pembangunan infrastrukturnya karena dengan adanya alokasi dana desa ini bisa membantu akan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah dalam membangun desa.

Dalam pengelolaannya juga sebaiknya ada keterbukaan atau tranparansi supaya dalam pelaksanaannya dapat terlihat jelas bahwa dana yang ada dipakai sesuai dengan program yang telah di sepakati bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena sering terjadi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa masih kurang dalam menyampaikan laporan dana yang telah dipakai untuk menunjang atau mendanai program yang ada. Karena ketika tidak ada laporan yang ada akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan tidak terselesaikan program yang disepakati. Dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan dikatakan bahwa harusnya ada sifat transparansi dari pihak pengelola.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset serta sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Djiwadono (dalam Nurman, 2015:24) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi: pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumbu pada sumber

## **Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur| Aditya Achmad Fathony dan Lusya Sitokmabin**

daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Pada penelitian ini mengkaji dana desa atau alokasi dana desa, serta partisipasi masyarakat desa pada wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang peruntukannya digunakan dalam membangun infrastruktur. Infrastruktur menurut Grigg (dalam Nurmadimah, 2012) adalah “semua fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum”. Menurut AGCA (Associated General Contractor of America), mendefinisikan infrastruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha.

Hasil observasi serta pra survey di lapangan, bahwa pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung belum optimal, hal ini dikarenakan pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur belum efektif, disertai pula partisipasi masyarakat desa yang kurang aktif. Adapun pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana fisik yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat hasil pengamatan penulis sebelum melakukan penelitian secara mendalam sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa perwakilan dari masyarakat mengenai kondisi infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah masih belum memenuhi harapan. Namun hal ini perlu dikaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian secara ilmiah. Infrastruktur yang belum optimal ini, penulis berasumsi bahwa masih rendahnya akuntabilitas pemanfaatan alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti lambatnya pencarian dana desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa. Permasalahan yang sering terjadi yaitu: pemerintah desa tidak bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaan. Masalah mengenai program yang tidak terselesaikan karena adanya pergantian kepala desa yang membuat program ada yang tidak terlaksana dengan baik dan tepat. Kondisi seperti ini bias membuat ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan dari pemerintah desa.

Masalah yang timbul tentang sistem pengelolaan alokasi dana desa yang kurang dipahami oleh berbagai pihak, contohnya masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan di desa. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan di desa harus dikelola dengan baik supaya dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ketika adanya sikap transparansi dari pengelolaan alokasi dana desa, secara jelas dan pasti pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap pengelolaan alokasi dana desa dan telah di programkan, perlu adanya akuntabilitas atau pertanggung jawaban dari pemerintahan desa yang terbuka kepada masyarakat agar bisa terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

2. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

## **II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Dana Desa**

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Adapun menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Hulme dan Tunner dalam Vikrama (2017), bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Dalam pasal 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

#### **2.1.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi menurut Zamroni (2011:51), merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti (2011:31-32) mengemukakan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau

## **Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur| Aditya Achmad Fathony dan Lusya Sitokmabin**

beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi masyarakat intinya ialah agar masyarakat umum atau sebanyak mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

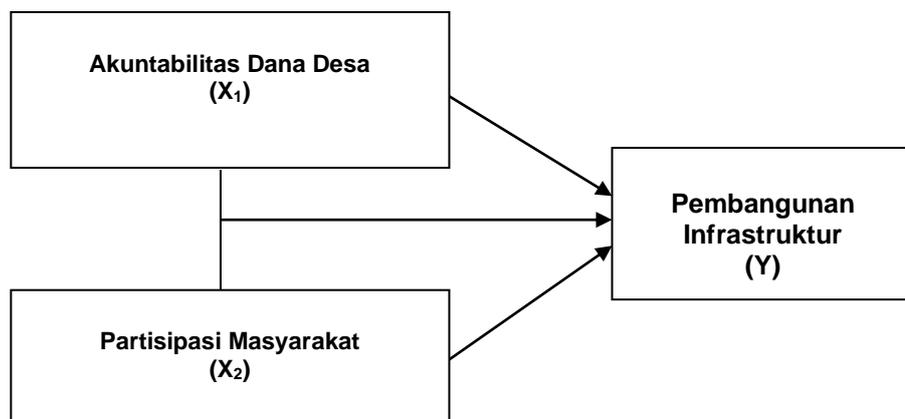
### **2.1.3 Pengertian Pembangunan Infrastruktur**

Definisi pembangunan menurut Rogers dalam Rochajat,dkk (2011:3) : adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Pengertian Infrastruktur, menurut *American Public Works Association* adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Bagan Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

## III. Objek dan Metode Penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur (Y)
2. Akuntabilitas Dana Desa (X<sub>1</sub>)
3. Partisipasi Masyarakat (X<sub>2</sub>)

### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

#### 3.2.1 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur| Aditya Achmad Fathony dan Lusya Sitokmabin**

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang berjumlah 8 (delapan) desa dan kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Andir
2. Kelurahan Baleendah
3. Desa Bojongmalaka
4. Desa Jelekong
5. Desa Malakasari
6. Desa Manggahang
7. Desa Rancamanyar
8. Desa Wargamekar

**3.2.1.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah dari jumlah 8 desa dan kelurahan antara lain : 8 orang Kepala Desa/Lurah sebagai pengambil kebijakan, 8 orang Sekretaris Desa/Kelurahan dan 32 orang Kepala Urusan/Kasi yang mengetahui dan terlibat langsung dengan keuangan, dan Ketua RW dan RT sebagai perwakilan dari masyarakat masing-masing berjumlah 1 orang, jadi jumlahnya sebanyak 2 orang. Secara jelasnya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian (Responden)**

No	Nama Desa / Kelurahan	Kepala Desa / Lurah	Sekretaris Desa / Kelurahan	Kaur / Kasi	Ketua RW dan RT	Jumlah
1	Kelurahan Andir	1	1	4	2	8
2	Kelurahan Baleendah	1	1	4	2	8
3	Desa Bojongmalaka	1	1	4	2	8
4	Desa Jelekong	1	1	4	2	8
5	Desa Malakasari	1	1	4	2	8
6	Desa Manggahang	1	1	4	2	8
7	Desa Rancamanyar	1	1	4	2	8
8	Desa Wargamekar	1	1	4	2	8
	<b>Total Sampel</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>64</b>

Sumber : Hasil Observasi / Pra survey (2023)

Berdasarkan data diatas, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 64 orang responden yang tersebar di desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Data diatas sesuai yang tertera pada struktur organisasi desa dan kelurahan, kecuali para staf desa yang tidak termasuk dalam kategori responden.

### 3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : “Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

#### 2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Infrastruktur.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Koefisien Korelasi Dan Taksirannya**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

### 3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

$R^2$  = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- b. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

### 4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64) mendefinisikan bahwa : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka  $H_0$  tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan  $H_a$  menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

#### a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Setelah menghitung nilai  $t_{hitung}$  selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**b. Uji F (Simultan)**

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yaitu:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**c. Menentukan Taraf Signifikansi**

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ( $\alpha = 0,05$ ) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

**IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1 Hasil Penelitian**

**4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.261	2.795		.809	.422
1 X1	.388	.080	.462	4.845	.000
X2	.420	.094	.427	4.478	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,261 + 0,388X_1 + 0,420X_2$$

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta dengan nilai 2,261 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2 = 0$ ), maka Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 2,261.
- b.  $b_1$  sebesar 0,388 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur| Aditya Achmad Fathony dan Lusya Sitokmabin**

Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,388 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

- c.  $b_2$  sebesar 0,420 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,420 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

**4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi**

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Korelasi Pearson**  
**Correlations**

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.557	.701
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	64	64	64
X2	Pearson Correlation	.557**	1	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	64	64	64
Y	Pearson Correlation	.701**	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Korelasi Ganda**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 <sup>a</sup>	.617	.604	3.572547

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- a. Korelasi antara Akuntabilitas Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 0,701. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur.
- b. Korelasi antara Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 0,685. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur.
- c. Korelasi ganda antara Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan dengan Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 0,785. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,70 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena nilainya positif, maka

dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur.

#### 4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,617 yang menunjukkan bahwa 61,7% Pembangunan Infrastruktur dapat dijelaskan oleh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat sedangkan sisanya sebesar 38,3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

#### 4.1.4 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

##### 1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

- Pada tabel 3 diatas nilai  $t_{hitung}$  untuk Akuntabilitas Dana Desa ( $X_1$ ) adalah sebesar 4,845, pada  $t_{tabel}$  dengan dk 61 ( $n-3 = 64-3$ ) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,845 > 1,999$ ) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas Dana Desa ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y).
- Pada tabel 3 diatas nilai  $t_{hitung}$  untuk Akuntabilitas Dana Desa ( $X_1$ ) adalah sebesar 4,478, pada  $t_{tabel}$  dengan dk 61 ( $n-3 = 64-3$ ) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,478 > 1,999$ ) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y).

##### 2. Uji F (Simultan)

**Tabel 6**  
**Hasil Perhitungan Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1252.881	2	626.441	49.082	.000 <sup>b</sup>
Residual	778.549	61	12.763		
Total	2031.430	63			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 49,082 sedangkan  $F_{tabel}$  dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 61 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,150. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $49,082 > 3,150$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas Dana Desa ( $X_1$ ) dan Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y).

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa secara Parsial terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Akuntabilitas Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur. Adapun pengaruh secara parsial Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Egah Nadia (2021) bahwa Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Evi Damayanti (2022) berdasarkan hasil penelitian, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng

Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur seperti halnya Aprisiami Putriyanti (dalam Lina Nasihatun, 2015 pelaksanaan pemerintah *governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian Nugroho (dalam Fahri, 2017) mengemukakan bahwa desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang proses bisnisnya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif. John P. (dalam Fahri, 2017) pun berpendapat bahwa lemahnya sumber daya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak dapat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa.

## **2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat secara Parsial terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Partisipasi Masyarakat akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur. Adapun pengaruh secara parsial Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ayu Ari Sendy (2020) di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. . Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mega Ch. Bungkurun, Een N. Walewangkodan Irawaty Masloman (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur sebagaimana Moeljarto Tjokrowinoto (2012:41) yang mengemukakan bahwa pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumbuh pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

## **3. Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara Simultan terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Pembangunan Infrastruktur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Pembangunan Infrastruktur. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 61,7% memiliki pengaruh yang cukup tinggi/cukup kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon ( $\epsilon$ ) sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur, peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila Alokasi Dana Desa dikelola dengan baik serta efektif dan tepat sasaran, disertai pula masyarakat yang memiliki semangat dan komitmen untuk membangun desa / kelurahan akan menentukan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi berdasarkan hasil analisis

menunjukkan adanya hubungan serta pengaruh yang positif dan signifikan antara Akuntabilitas Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan, apalagi keduanya secara bersama-sama apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian akuntabilitas dana desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya semakin baik akuntabilitas dana desa maka secara signifikan akan semakin baik pembangunan infrastruktur demikian pula sebaliknya.
2. Partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif dalam menentukan pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya semakin baik partisipasi masyarakat maka secara signifikan akan semakin baik pembangunan infrastruktur demikian pula sebaliknya.
3. Secara simultan akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya apabila secara bersama-sama akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat semakin baik, maka secara signifikan akan semakin baik pula pembangunan infrastruktur, demikian juga sebaliknya. Hasil pengaruh secara simultan ini cukup kuat/tinggi yaitu sebesar 61,7%, adapun sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya.

### **5.2 Saran**

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

#### **A. Bagi Instansi Pemerintah**

1. Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur, dengan demikian saran penulis, agar Kepala Desa / Lurah beserta aparatnya harus memperhatikan agar akuntabilitas dana desa terus ditingkatkan. semakin baik akuntabilitas dana desa maka akan mempengaruhi secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, dengan demikian agar seluruh aparat Desa / Kelurahan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran terhadap diri warga masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam setiap kegiatan maupun pembangunan di daerahnya, karena semakin baik partisipasi masyarakat maka akan

semakin baik juga pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, apalagi memiliki pengaruh yang signifikan.

3. Akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian penulis menyarankan agar seluruh elemen Pemerintahan Desa / Kelurahan serta masyarakat memperhatikan kedua faktor penentu pembangunan infrastruktur ini tetap baik dan optimal yaitu segala bentuk kegiatan harus akuntabel, disertai masyarakat yang berpartisipasi aktif, karena akan menentukan secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

#### **B. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Saran yang dapat penulis kemukakan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Menambah variabel independen yang telah disebutkan di atas misalnya epemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya.
2. Menambah variabel pemoderasi apakah akan memperkuat atau memperlemah variabel independen.
3. Memperluas lokus penelitian seperti Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bandung, atau jika terlalu banyak bisa juga meneliti setiap kecamatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA :**

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti.(2011). Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Yogyakarta : Perpustakaan Pelajaran.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. (2011). *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nasihatun, Nafidah Lina dan Mawar Suryaningtyas. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.3 No.1
- Nurmadimah, F. (2012) Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT Dengan Skema KPS. Tesis. Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil, Universitas Indonesia. Hal. 19-20.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2012). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vikrama, A. A. (2017). "Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi BMD pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli". *Citizen Charter*, 2(2).

**Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur| Aditya Achmad Fathony dan Lusya Sitokmabin**

Zamroni. (2011). Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa